



Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2017

RINGKASAN

- ☑ Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2017 sebesar Rp 374.009,- per kapita per bulan. Sementara garis kemiskinan pada Maret 2016 sebesar Rp 354.084,- per kapita per bulan, atau garis kemiskinan mengalami kenaikan sekitar 5,63 persen. Bila dibandingkan kondisi September 2016 yang sebesar Rp 360.169,- per kapita per bulan maka dalam kurun satu semester terjadi kenaikan sebesar 3,84 persen.
- ☑ Peran komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2017, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 71,52 persen.
- ☑ Jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan, pada Maret 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 488,53 ribu orang. Bila dibandingkan dengan keadaan Maret 2016 yang jumlah penduduk miskinnya mencapai 494,94 ribu orang, maka selama satu tahun terjadi penurunan sebesar 6,41 ribu jiwa.
- ☑ Tingkat kemiskinan yaitu persentase penduduk miskin dari seluruh penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2017 sebesar 13,02 persen. Apabila dibandingkan dengan keadaan September 2016 yang besarnya 13,10 persen berarti ada penurunan sebesar 0,08 poin selama setengah tahun. Sedangkan bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 dengan persentase penduduk miskin sebesar 13,34 persen, terjadi penurunan sebesar 0,32 poin.
- ☑ Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) pada periode Maret 2016 - Maret 2017 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menyempit.

1. Garis Kemiskinan Maret 2016 - Maret 2017

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan dimana terdapat sejumlah penduduk tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs*) minimum dan mereka hidup di bawah tingkat kebutuhan minimum

tersebut (Todaro dan Smith, 2007). Konsep yang dipakai BPS dalam mengukur kemiskinan juga berdasarkan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Nilai kebutuhan dasar minimum digambarkan dengan garis kemiskinan (GK), yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak.

Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2017 adalah Rp 374.009,- per kapita per bulan. Jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang garis kemiskinannya sebesar Rp 354.084,- per kapita per bulan, terjadi kenaikan sebesar 5,63 persen dan jika dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang besarnya Rp 360.169,- per kapita per bulan, maka tampak adanya kenaikan garis kemiskinan sebesar 3,84 persen. Terjadinya peningkatan garis kemiskinan ini sejalan dengan terjadinya inflasi Maret 2016 ke Maret 2017 yang sebesar 3,40 persen, serta inflasi September 2016 - Maret 2017 sebesar 2,27 persen.

Tabel 1.
Garis Kemiskinan menurut Tipe Daerah
Maret 2016 – Maret 2017

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
<u>Perkotaan</u>			
Maret 2016	254 284	110 502	364 786
Sept 2016	257 677	112 832	370 510
Maret 2017	270 924	114 383	385 308
<u>Perdesaan</u>			
Maret 2016	246 960	84 348	331 308
Sept 2016	250 244	86 986	337 230
Maret 2017	260 249	87 813	348 061
<u>Kota+Desa</u>			
Maret 2016	252 284	101 800	354 084
Sept 2016	255 304	104 865	360 169
Maret 2017	267 501	106 508	374 009

Sumber: BPS, Susenas Maret 2016, September 2016, Maret 2017

Bila dilihat komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2016 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 71,25 persen dan 71,52 persen pada Maret 2017.

Pada Maret 2017 garis kemiskinan di daerah perkotaan sebesar Rp 385.308,- per kapita per bulan, mengalami kenaikan 5,63 persen dibanding keadaan Maret 2016 yang sebesar Rp 364.786,- per kapita per bulan. Garis kemiskinan di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar Rp 348.061,- per kapita per bulan, mengalami kenaikan 5,06 persen dibanding keadaan Maret 2016 yang mencapai Rp 331.308,- per kapita per bulan.

Berdasarkan komoditas makanan, terdapat lima komoditas yang secara persentase memberikan kontribusi yang cukup besar pada garis kemiskinan makanan di perkotaan yaitu beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula pasir. Lima komoditi makanan yang berpengaruh cukup besar terhadap garis kemiskinan di perdesaan adalah beras, daging ayam ras, rokok kretek filter, telur ayam ras, dan gula pasir.

Komoditi non makanan yang memberikan sumbangan besar pada garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan yaitu perumahan, bensin, dan listrik. Komoditi lainnya yang termasuk dalam posisi lima terbesar di perkotaan adalah pendidikan dan kesehatan, sedangkan di perdesaan adalah kesehatan dan pendidikan.

Tabel 2.
Lima Kontribusi Terbesar Garis Kemiskinan menurut Tipe Daerah
Maret 2017 (Persen)

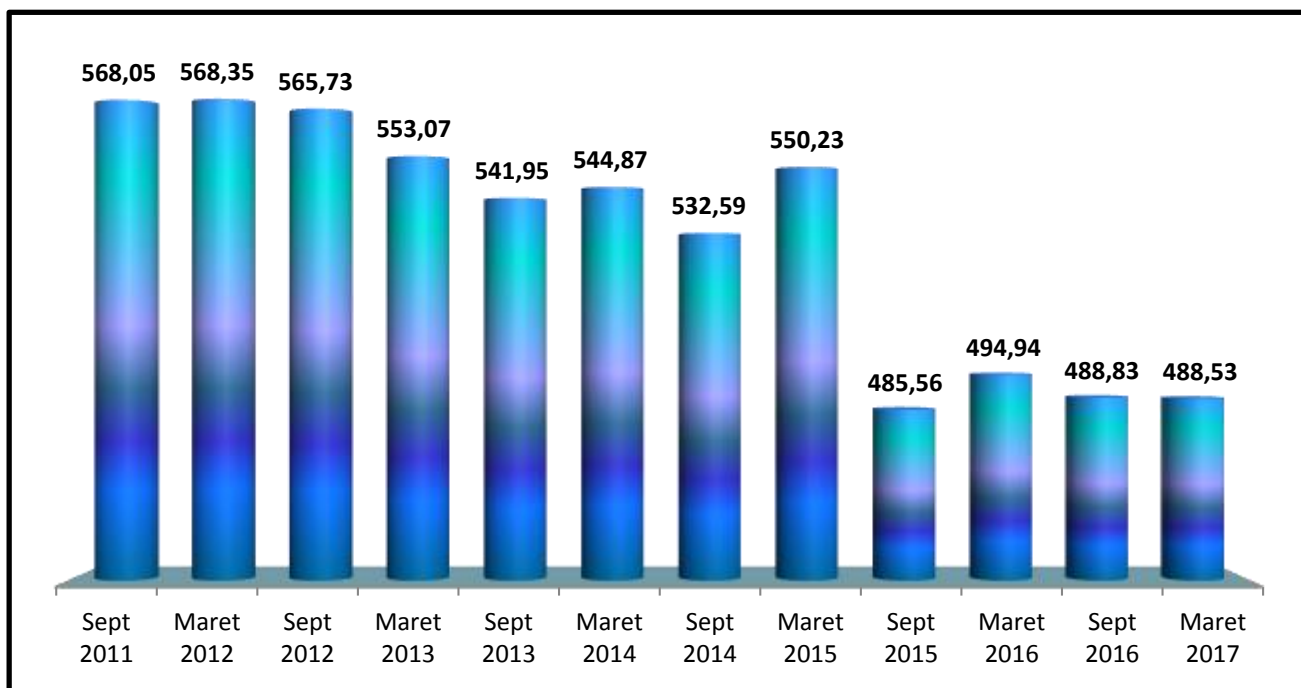
Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
Makanan			
Beras	27,31	Beras	33,08
Rokok kretek filter	12,06	Daging ayam ras	6,88
Daging ayam ras	6,99	Rokok kretek filter	6,33
Telur ayam ras	6,97	Telur ayam ras	5,30
Gula pasir	5,30	Gula pasir	4,55
Non Makanan			
Perumahan	27,62	Perumahan	24,37
Bensin	25,65	Bensin	21,65
Listrik	9,67	Listrik	6,11
Pendidikan	7,26	Kesehatan	6,02
Kesehatan	3,88	Pendidikan	5,96

Sumber: BPS, Susenas Maret 2017

2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta

Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode September 2011 - Maret 2017 mengalami fluktuasi. Pada periode September 2011 - Maret 2012 mengalami kenaikan dan turun kembali sampai periode September 2013. Jumlah penduduk miskin pada September 2011 sebesar 568,05 ribu, dan pada bulan Maret 2012 jumlah penduduk miskin naik menjadi 568,35 ribu. Sementara pada periode September 2012 - Maret 2017 mengalami fluktuasi. Perkembangan jumlah penduduk miskin seperti terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1.
Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta
September 2011 - Maret 2017 (dalam ribuan orang)



Sumber: BPS, Susenas September 2011 – Maret 2017

Penduduk miskin tersebar di perkotaan (63,26 persen) maupun perdesaan (36,74 persen). Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2017 sebanyak 309,03 ribu orang, berkurang 11,32 ribu orang bila dibandingkan keadaan Maret 2016 yang mencapai 297,71 ribu orang. Jumlah penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2017 sebanyak 179,51 ribu orang, mengalami penurunan sekitar 17,72 ribu dari keadaan Maret 2016 yang jumlahnya mencapai 197,23 ribu orang (Tabel 3).

Tabel 3.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
menurut Tipe Daerah, Maret 2016 - Maret 2017

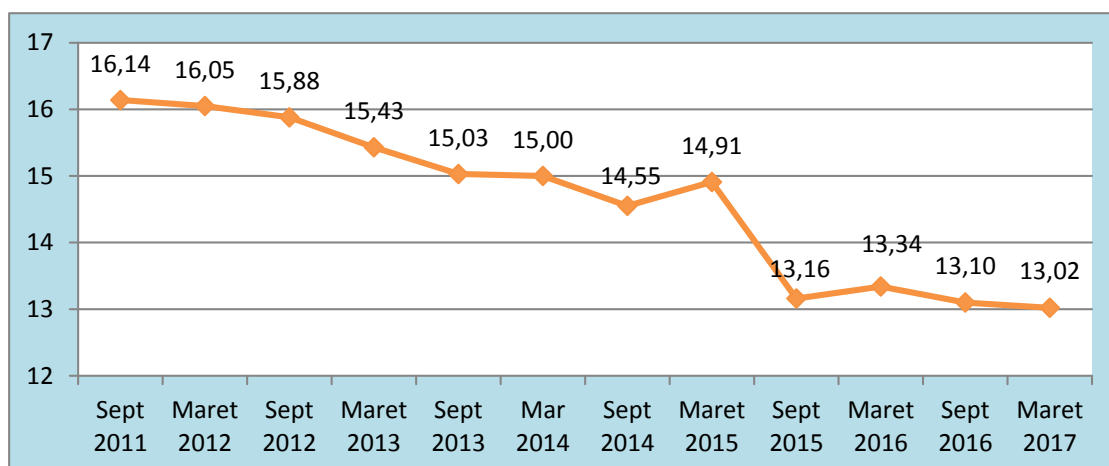
Daerah/Tahun	Jumlah penduduk miskin (000)	Persentase penduduk miskin
<u>Perkotaan</u>		
Maret 2016	297,71	11,79
September 2016	301,25	11,68
Maret 2017	309,03	11,72
<u>Perdesaan</u>		
Maret 2016	197,23	16,63
September 2016	187,58	16,27
Maret 2017	179,51	16,11
<u>Kota+Desa</u>		
Maret 2016	494,94	13,34
September 2016	488,83	13,10
Maret 2017	488,53	13,02

Sumber: BPS, Susenas Maret 2016, September 2016, dan Maret 2017

3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode September 2011 - Maret 2017 cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada September 2011 sebesar 16,14 persen, turun menjadi 13,02 persen pada Maret 2017. Perkembangan tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta selengkapnya seperti terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2.
Persentase Penduduk Miskin
di Daerah Istimewa Yogyakarta September 2011 – Maret 2017



Sumber: BPS, Susenas September 2011 - Maret 2017

Tingkat kemiskinan di perkotaan lebih kecil daripada di perdesaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2017 sebesar 11,72 persen mengalami penurunan 0,07 poin jika dibandingkan dengan keadaan Maret 2016 yang besarnya mencapai 11,79 persen. Persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2017 sebesar 16,11 persen, mengalami penurunan 0,52 poin jika dibandingkan dengan keadaan Maret 2016 yang mencapai 16,63 persen.

4. Kualitas Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman/*poverty gap index* dan tingkat keparahan/*poverty severity index* dari kemiskinan. Artinya, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan berkaitan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan itu.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) pada periode Maret 2016 - Maret 2017 sedikit mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 2,30 pada Maret 2016 menjadi 2,19 pada Maret 2017. Demikian pula Indeks keparahan kemiskinan turun dari 0,59 menjadi 0,55 pada periode yang sama (Tabel 4). Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menyempit.

Tabel 4.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)
di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Daerah, Maret 2016- Maret 2017

Tahun		Kota	Desa	Kota + Desa
<u>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)</u>				
Maret	2016	1,78	3,41	2,30
September	2016	1,26	2,83	1,75
Maret	2017	2,15	2,29	2,19
<u>Indeks Keparahannya Kemiskinan (P₂)</u>				
Maret	2016	0,38	1,05	0,59
September	2016	0,22	0,67	0,36
Maret	2017	0,58	0,47	0,55

Sumber: BPS, Susenas Maret 2016, September 2016 dan Maret 2017

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2017 di perdesaan lebih tinggi dari pada perkotaan, sedang Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) pada Maret 2017 di perdesaan lebih rendah dari pada perkotaan. Pada bulan Maret 2017 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perdesaan mencapai 2,29 sementara di perkotaan mencapai 2,15. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di perdesaan 0,47 sementara di perkotaan mencapai 0,58. Ini berarti rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan. Sementara itu kesenjangan pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin di perdesaan lebih sempit dibandingkan dengan di perkotaan.